

EFEKTIVITAS PROGRAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) DI DESA BANUA HANYAR KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Halidah¹, Anna Maryati², Mawarti³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
e-mail: Halidahhalidah44@gmail.com

ABSTRAK

Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian desa melalui pengelolaan unit usaha yang mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan menambah pendapatan desa. Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar adalah menurunnya jumlah unit usaha, rendahnya kontribusi keuntungan terhadap pendapatan desa, keterbatasan kualitas sumber daya manusia pengelola, serta belum optimalnya perencanaan, inovasi, dan evaluasi pengelolaan usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Penelitian ini memilih 11 informan melalui teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar secara keseluruhan dikategorikan cukup efektif. Kemampuan operasional, kemampuan pelaksana, tingkat output program, kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dampak program, dan pencapaian tujuan merupakan indikator yang dinilai cukup efektif. Sebaliknya, indikator pencapaian target, perbandingan input dan output, serta keuntungan dinilai kurang efektif karena target belum tercapai secara optimal dan hasil usaha belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan desa maupun kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor yang mendukung efektivitas program meliputi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan usaha BUMDes, dukungan pemerintah desa, serta potensi sumber daya desa. Di sisi lain, faktor-faktor yang menghambat meliputi keterbatasan modal usaha, rendahnya kualitas sumber daya manusia pengelola, serta kurangnya inovasi dan pengelolaan administrasi.

Kata Kunci: Efektivitas, BUMDes, Ekonomi Desa

ABSTRACT

The Village-Owned Enterprise (BUMDes) Management Program is an effort by the village government to improve the village economy through the management of business units that provide benefits to the community and increase village income. One of the problems faced in managing BUMDes in Banua Hanyar Village is the decreasing number of business units, the low contribution of profits to village income, limited quality of human resources among managers, and the lack of optimal planning, innovation, and evaluation in business management. This study aims to determine the effectiveness of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Management Program in Banua Hanyar Village, Daha Selatan District, Hulu Sungai Selatan Regency, as well as the factors influencing its effectiveness. This research used a qualitative descriptive approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation. The study involved 11 informants selected using purposive sampling technique. Data analysis was carried out through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that the BUMDes Management Program in Banua Hanyar Village was generally categorized as quite effective. Operational capability, implementation capability, program output level, service quality, community satisfaction, program impact, and goal achievement were indicators assessed as quite effective. Meanwhile, the indicators of target achievement, input-output comparison, and profit were considered less effective because the targets had not been optimally achieved and the business results had not significantly contributed to increasing village income and community

welfare. Factors supporting the effectiveness of the program include the high demand of the community for BUMDes business services, support from the village government, and the potential of village resources. On the other hand, inhibiting factors include limited business capital, low quality of human resources managing BUMDes, and lack of innovation and administrative management.

Keywords: *Effectiveness, BUMDes, Village Economy*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, maupun kelembagaan (Nur & Husen, 2022). Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan wilayah perkotaan, tetapi juga dipengaruhi oleh perkembangan wilayah pedesaan yang menjadi bagian penting dalam sistem pembangunan nasional. Desa memiliki posisi strategis karena sebagian besar masyarakat Indonesia bermukim di wilayah pedesaan dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai penopang utama kegiatan ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan desa menjadi salah satu prioritas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Komitmen pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang memberikan kewenangan lebih luas kepada desa untuk mengelola potensi yang dimiliki secara mandiri. Menurut Sjahrir dalam Iskandar (2020), keberhasilan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan pembangunan desa karena desa merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Pembangunan desa diarahkan pada upaya pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi potensi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan ekonomi agar desa mampu menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. Melalui pembangunan yang berkelanjutan, desa diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Perkembangan perekonomian nasional pada dasarnya berawal dari kemampuan daerah dan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. Desa yang memiliki kelembagaan ekonomi yang kuat akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung pembangunan nasional. Sebaliknya, lemahnya pengelolaan potensi ekonomi desa dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti rendahnya produktivitas masyarakat, terbatasnya lapangan pekerjaan, dan belum optimalnya peningkatan pendapatan masyarakat. Atas dasar tersebut, pemerintah terus mendorong berbagai program pemberdayaan ekonomi desa sebagai salah satu strategi untuk memperkuat struktur perekonomian nasional (Iskandar, 2020).

Berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi telah dilaksanakan pemerintah melalui pemberian bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan usaha, hingga penguatan kelembagaan ekonomi desa. Meskipun demikian, implementasi berbagai program tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya kualitas tata kelola, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya manajemen usaha, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat menyebabkan banyak program belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi desa memerlukan pengelolaan yang efektif agar potensi desa dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kebijakan pemerintah dalam memperkuat perekonomian desa diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun (2005) tentang Desa, BUMDes dibentuk sebagai lembaga usaha yang dikelola oleh pemerintah desa bersama masyarakat untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui berbagai kegiatan usaha produktif (Karim, 2019). Selanjutnya, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun (2015) menjelaskan bahwa pembentukan BUMDes bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), mengembangkan potensi desa, serta memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengelolaan usaha yang sesuai dengan karakteristik dan potensi desa masing-masing.

Penguatan kedudukan BUMDes kemudian dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menyatakan bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang didirikan oleh desa atau bersama beberapa desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi, menyediakan pelayanan, serta melaksanakan berbagai kegiatan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi desa sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan.

Perkembangan jumlah BUMDes di Indonesia menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kelembagaan ekonomi desa. Berdasarkan data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), hingga 22 Juni (2024) terdapat sekitar 65.941 BUMDes yang telah terbentuk di seluruh Indonesia. Namun demikian, hanya sekitar 75,8% yang masih aktif menjalankan kegiatan usahanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun jumlah BUMDes terus mengalami peningkatan, efektivitas pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya pendampingan, serta belum optimalnya sinergi antara pemerintah desa, pengelola, dan masyarakat.

Kondisi serupa juga terlihat di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, sebanyak 1.743 BUMDes telah terbentuk dari total 1.871 desa, dengan 620 di antaranya telah berbadan hukum. Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membentuk BUMDes pada seluruh desa yang berjumlah 144 unit. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pembentukan BUMDes telah dilaksanakan secara luas sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi lokal.

Salah satu desa yang telah membentuk BUMDes adalah Desa Banua Hanyar, Kecamatan Daha Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. BUMDes di desa ini didirikan pada tahun 2016 sebagai upaya mengembangkan potensi ekonomi desa, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui berbagai unit usaha yang dijalankan, BUMDes diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), menciptakan lapangan kerja, serta mendorong terwujudnya kemandirian ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal, pelaksanaan Program Pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar masih menghadapi berbagai kendala. Permasalahan tersebut terlihat dari perkembangan unit usaha yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun sehingga menunjukkan belum stabilnya keberlangsungan usaha yang dikelola. Selain itu, unit usaha yang masih beroperasi belum mampu memberikan kontribusi keuntungan yang optimal terhadap pendapatan desa. Dari sisi pengelolaan, kemampuan sumber daya manusia masih terbatas, terutama dalam aspek manajerial, kewirausahaan, serta administrasi keuangan yang belum dilaksanakan secara tertib dan sistematis. Di samping itu, perencanaan pengembangan usaha, inovasi program, serta evaluasi kegiatan juga belum dilakukan secara optimal sehingga pengelolaan BUMDes belum memiliki arah pengembangan yang jelas dan

berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan."

METODE

Penelitian ini dilakukan di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami suatu fenomena secara mendalam berdasarkan kondisi yang terjadi secara alami, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data (Nasution, 2023:16). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang memiliki keterkaitan dan pemahaman terhadap objek penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 11 orang yang terdiri dari Kepala Desa Banua Hanyar, Direksi BUMDes, Sekretaris Desa, Bendahara BUMDes, Pengelola BUMDes, Kepala Unit Usaha BUMDes, serta masyarakat Desa Banua Hanyar. Penelitian ini menggunakan indikator efektivitas menurut Campbell J.P. dalam (Amrizal *et al.*, 2018) yang meliputi keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui perpanjangan keterlibatan, pengamatan terus-menerus, triangulasi, peer debriefing, analisis kasus negatif, kecukupan referensial, dan member check (Nasution, 2023).

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Berdasarkan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Campbell J.P. dalam (Amrizal *et al.*, 2018) efektivitas suatu program dapat dilihat melalui beberapa indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Keberhasilan Program

Keberhasilan program berkaitan dengan sejauh mana pelaksanaan Program Pengelolaan BUMDes mampu berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

a. Kemampuan Operasional

Kemampuan operasional dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan kemampuan pengelola dalam menjalankan seluruh kegiatan usaha, baik dari aspek pelaksanaan kegiatan, pelayanan, maupun pengelolaan administrasi agar program dapat berjalan secara efektif.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan operasional BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong cukup efektif, karena sebagian besar kegiatan usaha masih berjalan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan modal, sarana pendukung, dan pengelolaan usaha yang belum maksimal.

b. Kemampuan Pelaksana

Kemampuan pelaksana dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan sejauh mana pengelola mampu menjalankan tugas, tanggung jawab, serta perannya dalam mengelola kegiatan usaha, pelayanan, dan administrasi BUMDes. Program dapat berjalan efektif apabila pengelola memiliki kemampuan, keterampilan, dan pemahaman yang memadai dalam menjalankan kegiatan usaha agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan pelaksana BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong cukup efektif, karena pengelola telah mampu menjalankan kegiatan usaha, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan pengelolaan administrasi sederhana. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala berupa keterbatasan kualitas sumber daya manusia, kurangnya pelatihan dan pendampingan, serta belum maksimalnya inovasi dalam pengembangan usaha BUMDes.

2. Keberhasilan Sasaran

Keberhasilan sasaran dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat dilihat dari kemampuan program dalam mencapai tujuan dan target yang telah direncanakan sebelumnya. Indikator ini menggambarkan sejauh mana hasil pelaksanaan BUMDes mampu memenuhi sasaran yang ditetapkan serta memberikan manfaat bagi perkembangan usaha dan masyarakat desa. Program dapat dikatakan efektif apabila target yang telah direncanakan dapat terealisasi dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan BUMDes.

a. Tingkat Output Program

Tingkat output program dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Keberhasilan pada indikator ini dapat dilihat melalui perkembangan unit usaha, manfaat layanan yang diberikan kepada masyarakat, serta kontribusi usaha terhadap pemasukan BUMDes maupun desa. Program dinilai efektif apabila mampu menghasilkan manfaat nyata sesuai dengan tujuan pembentukannya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat output program BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong cukup efektif, karena beberapa unit usaha yang dijalankan masih mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti layanan penyewaan tenda, sewa jukung, pengelolaan balai badminton, dan jual beli kacang. Selain itu, keberadaan BUMDes juga memberikan tambahan pemasukan bagi desa serta membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, hasil yang diperoleh masih belum maksimal karena perkembangan usaha belum stabil, keuntungan yang dihasilkan masih terbatas, serta inovasi dan pengembangan usaha masih perlu ditingkatkan agar dampak ekonomi yang diberikan dapat lebih luas.

b. Pencapaian Target

Pencapaian target dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan tingkat keberhasilan program dalam merealisasikan sasaran yang telah ditentukan, baik dari aspek perkembangan usaha, peningkatan pendapatan, maupun manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Suatu program dapat dikatakan efektif apabila target yang telah direncanakan mampu dicapai sesuai dengan waktu, kemampuan, dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencapaian target BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong kurang efektif, karena sebagian target yang telah direncanakan belum dapat diwujudkan secara optimal. Meskipun beberapa kegiatan pelayanan usaha telah berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, namun target dalam peningkatan keuntungan, pengembangan unit usaha, serta kontribusi terhadap pendapatan desa masih belum tercapai secara maksimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan modal, kemampuan pengelolaan usaha yang masih perlu ditingkatkan, serta belum optimalnya inovasi dalam pengembangan BUMDes.

3. Kepuasan Terhadap Program

Indikator ini menunjukkan tingkat penilaian masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan manfaat yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan. Program dapat dikatakan efektif apabila mampu memberikan pelayanan yang baik serta memberikan dampak positif bagi masyarakat desa.

a. Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan dalam pengelolaan BUMDes berkaitan dengan kemampuan pengelola dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, ramah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes serta mendorong masyarakat untuk terus memanfaatkan layanan yang tersedia.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong cukup efektif, karena pengelola telah mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat melalui berbagai unit usaha yang tersedia, seperti penyewaan tenda, sewa jukung, dan usaha lainnya. Masyarakat juga merasa cukup terbantu dengan pelayanan yang diberikan. Namun, kualitas pelayanan masih perlu ditingkatkan terutama dalam aspek kemampuan pengelola, konsistensi pelayanan, serta pengembangan sistem pelayanan agar lebih optimal.

b. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat merupakan salah satu indikator dalam melihat keberhasilan program BUMDes, yang dapat diketahui melalui sejauh mana masyarakat merasa terbantu dan merasakan manfaat dari keberadaan program tersebut. Kepuasan masyarakat terlihat dari kemudahan memperoleh layanan, manfaat ekonomi, serta penilaian positif terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong cukup efektif, karena keberadaan BUMDes telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan penyewaan dan layanan usaha desa. Masyarakat juga memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan yang diberikan oleh pengelola. Namun, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat sehingga pengembangan usaha dan peningkatan pelayanan masih perlu dilakukan agar keberadaan BUMDes dapat memberikan manfaat yang lebih luas.

4. Tingkat Input dan Output

Indikator ini dilihat melalui kesesuaian antara modal, tenaga kerja, serta sarana yang digunakan dengan hasil yang diperoleh dari kegiatan usaha BUMDes. Program dapat dikatakan efektif apabila sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan hasil usaha yang optimal dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa.

a. Perbandingan Input dan Output

Perbandingan input dan output berkaitan dengan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengelolaan BUMDes. Pengelolaan program dinilai efektif apabila modal, tenaga, dan fasilitas yang digunakan mampu menghasilkan pendapatan serta perkembangan usaha yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa perbandingan input dan output dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong kurang efektif, karena sumber daya yang digunakan belum mampu menghasilkan output yang sebanding. Modal, tenaga kerja, dan biaya operasional yang dikeluarkan masih cukup besar, sedangkan keuntungan yang diperoleh relatif kecil dan belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan desa. Walaupun beberapa unit usaha masih berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, hasil yang diperoleh belum menunjukkan perkembangan yang optimal sehingga efisiensi pengelolaan sumber daya masih perlu ditingkatkan.

b. Keuntungan

Keuntungan dalam pengelolaan BUMDes menunjukkan hasil ekonomi yang diperoleh dari kegiatan usaha yang dijalankan. Program dapat dikatakan efektif apabila usaha yang dikelola mampu menghasilkan keuntungan yang stabil, memberikan tambahan pendapatan bagi desa, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong kurang efektif, karena meskipun kegiatan usaha telah menghasilkan pendapatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, jumlah keuntungan yang diperoleh masih relatif kecil. Keberadaan BUMDes telah membantu masyarakat melalui penyediaan layanan usaha seperti penyewaan tenda, sewa jukung, dan usaha lainnya, namun kontribusi terhadap peningkatan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan pengembangan usaha, hasil usaha yang belum stabil, serta keuntungan yang belum mampu berkembang secara optimal.

5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh

Indikator ini melihat hasil akhir pelaksanaan program, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun keberlanjutan usaha desa. Program dikatakan efektif apabila kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan manfaat nyata serta mendukung perkembangan desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

a. Dampak Program

Dampak program dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat setelah adanya berbagai kegiatan usaha yang dijalankan. Dampak tersebut mencakup kemudahan masyarakat dalam memperoleh layanan usaha, peningkatan aktivitas ekonomi desa, serta manfaat sosial yang muncul dari keberadaan

BUMDes. Program dikatakan efektif apabila mampu memberikan perubahan positif dan membantu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dan observasi di lapangan, dapat disimpulkan bahwa dampak program BUMDes di Desa Banua Hanyar tergolong cukup efektif. Hal ini terlihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat melalui keberadaan berbagai unit usaha, seperti penyewaan tenda, sewa jukung, balai badminton, serta usaha jual beli kacang. Keberadaan BUMDes telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kegiatan sosial, keagamaan, maupun usaha tanpa harus mencari layanan ke luar desa. Selain itu, usaha jual beli kacang juga membantu masyarakat dalam memasarkan hasil usaha yang dimiliki. Namun demikian, dampak yang diberikan oleh BUMDes belum sepenuhnya optimal karena manfaat program belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Keterbatasan jumlah unit usaha, sarana pendukung, serta pengembangan usaha yang masih terbatas menyebabkan dampak ekonomi yang dihasilkan belum mampu memberikan perubahan besar terhadap kesejahteraan masyarakat desa..

b. Ketepatan Tujuan

Ketepatan tujuan dalam pengelolaan BUMDes dapat dilihat dari kesesuaian antara pelaksanaan program dengan tujuan awal pembentukannya, yaitu meningkatkan perekonomian desa, memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengembangkan potensi usaha yang dimiliki desa. Program dikatakan efektif apabila seluruh kegiatan yang dilaksanakan mampu mengarah pada pencapaian tujuan yang telah direncanakan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi, pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar dapat dikategorikan cukup efektif dalam mencapai ketepatan tujuan. Hal ini terlihat dari pelaksanaan berbagai unit usaha yang telah sesuai dengan tujuan awal pembentukan BUMDes, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi desa. Beberapa layanan seperti penyewaan tenda, sewa jukung, balai badminton, serta usaha lainnya telah membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Meskipun demikian, pencapaian tujuan tersebut masih belum sepenuhnya maksimal karena masih terdapat beberapa target yang belum tercapai secara optimal, terutama dalam pengembangan usaha, peningkatan keuntungan, dan perluasan manfaat bagi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa BUMDes telah berjalan sesuai arah tujuan awal, tetapi masih membutuhkan peningkatan dalam pengelolaan, inovasi usaha, dan pengembangan unit usaha agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara lebih optimal.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Program Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Setiap program yang dilaksanakan tidak terlepas dari berbagai faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa faktor pendorong maupun faktor penghambat yang memengaruhi proses pelaksanaan dan perkembangan program. Hal ini juga terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banua Hanyar, di mana efektivitas pengelolaannya dipengaruhi

oleh berbagai kondisi yang mendukung maupun menghambat keberlangsungan usaha dalam mencapai tujuan peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat.

1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan berbagai kondisi yang dapat menghambat keberhasilan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hambatan tersebut dapat berasal dari aspek internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kemampuan pengelola, serta sistem pengelolaan usaha yang belum optimal.

a. Kurangnya Modal Usaha BUMDes

Salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar adalah keterbatasan modal usaha yang dimiliki. Keterbatasan modal menyebabkan BUMDes mengalami kesulitan dalam mengembangkan unit usaha, menambah sarana pendukung, serta meningkatkan kapasitas usaha yang telah berjalan. Selain itu, hasil usaha yang diperoleh sebagian besar masih digunakan untuk kebutuhan operasional dan upah tenaga pengelola sehingga dana yang dapat digunakan sebagai tambahan modal pengembangan usaha masih terbatas.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keterbatasan modal menjadi salah satu kendala utama dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa unit usaha belum dapat berkembang secara optimal dan penambahan fasilitas usaha belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan pengelolaan hasil usaha yang lebih baik serta dukungan tambahan modal agar BUMDes mampu mengembangkan usaha dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

b. Keterbatasan Kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola BUMDes

Faktor penghambat lainnya dalam pengelolaan BUMDes adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang mengelola kegiatan usaha. Keterbatasan tersebut meliputi kurangnya keterampilan, pengalaman, kemampuan manajerial, serta pemahaman dalam pengelolaan usaha dan administrasi BUMDes. Kondisi ini menyebabkan pengelolaan usaha belum berjalan secara maksimal dan perkembangan unit usaha masih mengalami hambatan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, keterbatasan kemampuan dan pengalaman pengelola menjadi salah satu kendala dalam efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar. Beberapa pengelola masih membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan maupun pendampingan agar mampu mengelola usaha dengan lebih baik. Kondisi ini menunjukkan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia agar pengelolaan usaha, pelayanan masyarakat, dan pengembangan BUMDes dapat berjalan lebih efektif.

c. Kurangnya Inovasi dan Pengelolaan Administrasi

Kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha serta pengelolaan administrasi yang belum tertata secara maksimal juga menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar. Keterbatasan inovasi menyebabkan unit usaha yang dijalankan belum mengalami banyak perkembangan, sedangkan administrasi dan pencatatan keuangan yang belum sistematis dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan usaha.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, kurangnya inovasi usaha serta pengelolaan administrasi yang masih sederhana menjadi kendala dalam pengembangan BUMDes. Kondisi tersebut menyebabkan peluang pengembangan usaha baru belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan pencatatan kegiatan usaha masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan inovasi, perbaikan sistem administrasi, serta pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur agar BUMDes di Desa Banua Hanyar dapat berkembang dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara lebih maksimal.

2. Faktor Pendorong

Faktor pendorong merupakan berbagai kondisi, dukungan, dan potensi yang dapat memperkuat efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberadaan faktor pendorong ini dapat membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan usaha, mendukung pengembangan unit usaha, serta meningkatkan manfaat BUMDes bagi masyarakat Desa Banua Hanyar.

a. Tingginya Kebutuhan Masyarakat Terhadap Layanan BUMDes

Masyarakat masih memanfaatkan berbagai unit usaha seperti penyewaan tenda, penyewaan jukung, penyewaan balai badminton, serta usaha jual beli kacang untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sosial, keagamaan, maupun kebutuhan lainnya. Tingginya pemanfaatan layanan tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan BUMDes menjadi salah satu faktor pendukung dalam menjaga keberlangsungan kegiatan usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMDes masih diperlukan oleh masyarakat karena mampu memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Oleh karena itu, pemanfaatan layanan yang terus dilakukan masyarakat menjadi peluang bagi BUMDes untuk mempertahankan dan mengembangkan unit usaha yang telah berjalan.

b. Dukungan Pemerintah Desa

Faktor pendorong lainnya adalah adanya dukungan dari pemerintah Desa Banua Hanyar terhadap pengelolaan dan pengembangan BUMDes. Dukungan tersebut dapat berupa perhatian terhadap keberlangsungan usaha, koordinasi dengan pengelola BUMDes, serta keterlibatan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha. Adanya dukungan pemerintah desa memberikan pengaruh positif terhadap keberjalanan program dan pengembangan usaha BUMDes.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dukungan pemerintah desa menjadi salah satu faktor yang membantu pelaksanaan pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha BUMDes, baik melalui dukungan kebijakan maupun koordinasi dengan pihak pengelola. Dukungan tersebut diperlukan agar kegiatan usaha dapat terus berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

c. Adanya Potensi Usaha dan Sumber Daya Desa

Adanya potensi usaha dan sumber daya desa juga menjadi salah satu faktor pendorong dalam pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar. Potensi tersebut meliputi usaha penyewaan fasilitas, usaha jual beli kacang, serta berbagai sumber daya yang dapat

dikembangkan untuk mendukung kegiatan ekonomi desa. Pemanfaatan potensi yang tersedia dapat menjadi peluang bagi BUMDes dalam meningkatkan perkembangan usaha dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, adanya potensi usaha dan sumber daya desa menjadi faktor pendukung dalam pengembangan BUMDes. Kondisi ini menunjukkan bahwa Desa Banua Hanyar memiliki peluang usaha yang masih dapat dikembangkan apabila dikelola secara optimal. Oleh karena itu, pemanfaatan potensi desa secara tepat dapat membantu meningkatkan keberlangsungan usaha BUMDes serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian mengenai Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Banua Hanyar Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BUMDes tergolong cukup efektif. Hal ini terlihat dari beberapa indikator yang telah berjalan cukup efektif, yaitu kemampuan operasional, kemampuan pelaksana, tingkat output program, kualitas pelayanan, kepuasan masyarakat, dampak program, dan pencapaian tujuan. Selain itu, indikator yang masih berada pada kategori kurang efektif meliputi pencapaian target, perbandingan input dan output, serta keuntungan yang diperoleh BUMDes. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes telah mampu menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat bagi masyarakat melalui berbagai unit usaha yang tersedia, seperti penyewaan tenda, sewa jukung, balai badminton, dan usaha jual beli kacang. Namun demikian, masih terdapat beberapa aspek yang belum berjalan secara optimal, terutama dalam pencapaian target usaha, keseimbangan antara penggunaan sumber daya dengan hasil yang diperoleh, serta peningkatan keuntungan BUMDes yang masih belum stabil. Keterbatasan modal, kemampuan pengelola, serta kurangnya inovasi dalam pengembangan usaha menjadi faktor utama yang mempengaruhi kondisi tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan BUMDes di Desa Banua Hanyar terdiri dari faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorongnya meliputi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan usaha BUMDes, adanya dukungan dari pemerintah desa, serta adanya potensi usaha dan sumber daya desa yang masih dapat dikembangkan. Sementara itu, faktor penghambatnya meliputi keterbatasan modal usaha, keterbatasan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes, serta kurangnya inovasi dan pengelolaan administrasi yang belum tertata secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrizal, D., Dalimunthe, A. H., & Yusrilati. (2018). *Penanggulangan golput dalam pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada*. Lembaga Penelitian dan Penelitian Ilmiah AQLI.
- Anonim. (2024). *Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia: 65.941 BUMDes dengan 18.850 badan hukum*. <https://www.antaranews.com/berita/4163808/mendes-pdtt-18850bumdes-telah-berbadan-hukum>
- Indonesia, P. R. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa*. Pemerintah Republik Indonesia.
- Iskandar, A. H. (2020). *SDGs Desa: Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Karim, A. (2019). *Peningkatan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Nas



Media Pustaka.

Kementerian Desa dan Transmigrasi, P. D. T. (2015). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*. Kemendes PDTT.

Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Harfa Creative.

Nur, M. S., & Husen, A. (2022). Studi Literatur: Penerapan Tata Kelola Lingkungan yang Baik dan Pembangunan Berkelanjutan sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Pertumbuhan Hijau Dan Manajemen Lingkungan*, 11(1), 35–49.